

**FUNGSI KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KAMPUNG HERAEWA DISTRIK MAIMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik Guna Mencapai Gelar  
Sarjana S. IP Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan*



Oleh:

**AMINATUS SADIYAH**

Nim: 201610012

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH ( UNAI'M ) YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**2020**

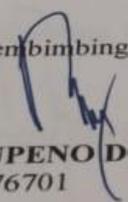
HALAMAN PERSETUJUAN  
FUNGSI KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KAMPUNG HERAEWA DISTRIK MAIMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas penulisan,

NAMA : AMINATUS SADIYAH  
NIM : 201610102  
FAKULTAS : Ilmu Pemerintahan (S1)

Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal 20 Oktober 2020

Pembimbing I

  
**BAMBANG SUPENO DOMI, S. Sos. M. Si**  
NIDN. 1204076701

Pembimbing II

  
**RIANIK THOMAS, SE. M. Si**  
NIDN. 1415097907

Mengetahui;  
Ketua Program Studi

  
**SITI KHIKMATUL RIZQI, S. IP. M. Si**  
NIDN. 1425108601



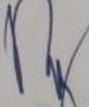
HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KAMPUNG HERAEWA DISTRIK MAIMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Telah Dipertahankan Skripsi ini di Depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,



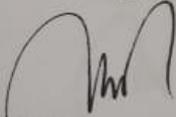
**BAMBANG SUPENO DOML, S. Sos. M. Si**  
NIDN. 1204076701

Sekretaris,



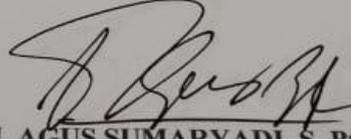
**RIANIK THOMAS, SE. M. Si**  
NIDN. 1415097901

Anggota,



**Dra. TELLY NANCY SILOOY, M. Si**  
NIDN.1207086701

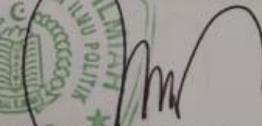
Anggota,



**H. AGUS SUMARYADI, S. Pt. M. Si**  
NIDN.1212116701

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Fisip



**Dra. TELLY NANCY SILOOY, M. Si**  
NIDN.1207086701

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, dan perlindungan serta pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak DR. H. Rudihartono Ismail, S.Pd, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Bapak Bambang Supeno Domi, S. Sos. M. Si Selaku Pembimbing I dan Ibu Rianik Thomas, SE. M. Si Selaku Pembimbing II, yang dengan sepenuh hati memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Siti Khimatul Rizqi, S. IP. M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Amal Ilmiah (UNAI'M) Yapis Wamena.
4. Bapak dosen wali yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis selama studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama studi.
6. Kedua orang tua ku yang tercinta yang selama ini dengan sabar menunggu penulis dalam menyelesaikan kuliah.

7. Suami ku dan anak-anak ku yang tercinta yang selama ini mendukung moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, khususnya angkatan tahun 2016 atas kebersamaannya selama ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini dengan rela membantu penulis baik moril dan materil selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sesuai yang diharapkan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

**Wamena,      September    2020**

**P e n u l i s**

**AMINATUS SA'DIYAH**  
**Nim: 201610012**

## **ABSTRAKSI**

AMINATUS SA'DIYAH, NIM. 201610102, Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya, (Pembimbing: BAMBANG SUPENO DOMI dan RIANIK THOMAS).

Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaa mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini merupakan variabel mandiri dengan indikatornya : Penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Melaksanakan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan menjaga hubungan kemitraan. populasi sebanyak 13 orang. Analisa data yang di gunakan adalah analisa deskriptif menggunakan skor.

Berdasarkan hasil analisa data, menunjukkan fungsi kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya di peroleh skor sebesar 39,5 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari indikator penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan skor 42,6, melaksanakan pembangunan dengan skor 42,6, pembinaan kemasyarakatan dengan skor 40,33 pemberdayaan masyarakat dengan skor 39,6 dan menjaga hubungan kemitraan dengan skor 32,33

**Kata kerja : Fungsi Kepala Kampung, Pemerintahan Kampung.**

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

1. Kerangka konseptual penelitian .....	29
2. susunan organisasi Kantor Kampung .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3 Kuesioner
- Lampiran 4 Data Hasil Penelitian
- Lampiran 5 Gambar Penelitian
- Lampiran 6 Biodata Penulis

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
1. Kerangka konseptual penelitian .....	28
2. Struktur organisasi .....	34

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. Landasan Teori</b> .....	7
A. Kajian teori .....	7
1. Pengertian fungsi .....	7
2. Fungsi kepala kampung .....	7
3. Tugas kepala kampung .....	11
4. penyelenggaraan pemerintahan kampung .....	18
5. pembangunan kampung .....	20
6. konsep pemerintahan kampung .....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Definisi Operasional.....	27
D. Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</b> .....	29
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
1. Lokasi Penelitian .....	29
2. Waktu Penelitian .....	29

B. Jenis Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel .....	29
D. Instrumen Penelitian ..... <sup>iv</sup> .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. kajian kepustakaan.....	31
2. Pengamatan .....	31
3. Kuesioner .....	31
F. Teknik Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A . Hasil penelitian .....	34
B . Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A . Kesimpulan .....	62
B . Saran .....	62

*DAFTAR PUSTAKA*

*LAMPIRAN-LAMPIRAN*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam UU. Nomor. 32 tahun 2004 tersebut Pemerintah Kampung sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di Kampung guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Kampung dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Fungsi aparatur pemerintah Kampung sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan Fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Pengaturan mengenai sebutan Kampung menjadi Kampung serta Kecamatan menjadi Distri diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan kampung merupakan

unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat kampung merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung merupakan sub system dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan kampung, baik itu kepala kampung, sekretaris Kampung, dan Badan Musyawara Kampung (BMK) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang profesional dan akuntabel, Sehingga sebuah Kampung dapat berkembang dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia. Namun harapan ideal agar siswa dan warga negara paham dan selanjutnya berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan Kampung belum sebagaimana diharapkan. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum faham benar mengenai fungsi dan keberadaan Kampung berikut aparatnya.

Hal ini tercermin dari minimnya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Di samping itu aparat Kampung juga demikian, kasus pemahaman Kepala Kampung Sanggung Kecamatan Gatak menunjukkan hal tersebut.

Umar Hadi kepala Kampung Gatak di tahan oleh Kepolisian Resort Sukoharjo pada 22 Juni 2011. Umar Hadi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Tahun Anggaran 2008. Umar Hadi di tuduh melarikan sejumlah drum berisi aspal bantuan pembangunan jalan dengan total kerugian negara dalam kasus itu sekitar Rp 28,5 Juta.(Ovi,2011). Dapat disimpulkan dari berbagai kasus yang menyangkut kepala Kampung khususnya tugas dan fungsinya yang berubah alih menjadi tindak pidana maupun penyelewengan kekuasaan, perlu adanya pemahaman yang lebih tentang PP No. 72 tahun 2005 tentang Kampung. Masyarakat juga harus ikut andil dalam mengawasi kinerja perangkat-perangkat Kampung dimana kepala Kampung harus menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang baik, sebagai contoh dan panutan yang baik bagi masyarakatnya agar kedepannya kemajuan dan kesejahteraan Kampung dapat tercapa.

Sampai sejauh ini Fungsi Aparatur Pemerintahan di Kampung Heraewa belum terealisasi dengan baik dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, suatu hal dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. artinya pencapaian hal yang dimaksudkan diatas merupakan pencapaian dan tujuan yang dilakukan sesuai dengan tindak-tindakan untuk mencapai keinginan dan maksud dari pada masyarakat.

Tujuan yang dimaksud disini adalah Fungsi dari pada Pemerintah Kampung khususnya Kepala Kampung dalam proses pencapaian tujuan dan/atau keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Salah satu sasaran utama dari Fungsi Kepala Kampung yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Fungsi aparatur pemerintah Kampung merupakan upaya yang diharapkan oleh masyarakat untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar, 2005).

Dalam pengamatan penulis dilapangan, Fungsi Kepala Kampung Heraewa masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat. hal ini menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat kurang baik.

Masalah yang dapat dirasakan secara langsung tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung seperti pelayanan pembuatan Surat-menyurat, pembinaan kepada masyarakat tidak pernah dilakukan, pembinaan pereokomian, penyusunan dan pengajuan kepada rancangan undang-undang. oleh sebab itu pelayanan belum maksimal kepada masyarakat. Demikian juga ada salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap peran dari pada kepala Kampung dan perangkat kampung sering meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat (*public service*). Selain itu Fungsi Pemerintah Kampung Heraewa dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. masih kurangnya program pemerintahan Kampung, yang terealisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua*”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini akan batasi satu variabel yaitu pelaksanaan Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa terdiri dari 5 indikator yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung
- b. Melaksanakan pembangunan
- d. Pembinaan kemasyarakatan
- e. Pemberdayaan masyarakat dan
- f. Menjaga hubungan kemitraan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah “Sejauh mana Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya”.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Sugiyono, 2006:326) dengan demikian dicapainya tujuan di atas, diharapkan dapat berguna sebagai :

###### **a. Kegunaan teoritis**

Sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya bagaimanakah Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya.

###### **b. Kegunaan praktis**

Sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Pemerintahan khususnya dalam bagaimanakah Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

## 1. Pengertian Fungsi

Sehubungan dengan pengertian Fungsi Menurut **Simanjuntak (2000:3)** mengatakan fungsi adalah “besaran yang berhubungan atau besaran yang berubah”. Sedangkan menurut **Musanef (2004:10)** mengatakan fungsi adalah “sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”. **Siagian (2006:155)** mengatakan fungsi adalah “perincian dari tugas – tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* (penurunan) dari pada fungsi – fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan”. Kata fungsi sering bahkan identik dengan kata peran (*role*).

## 2. Fungsi Kepala Kampung

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kampung atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Kampung dan kepada Kampung dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Kampung diluar Kampung geneologis yaitu Kampung yang bersifat administratif seperti Kampung yang dibentuk karena pemekaran Kampung atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang

warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Kampung yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Kampung itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Kampung, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Kampung.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Kampung mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Kampung, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota diberikan kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kampung diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Kampung. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Kampung berasal dari Badan Usaha Milik Kampung,

pengelolaan pasar Kampung, pengelolaan kawasan wisata skala Kampung, pengelolaan galian dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Di dalam Peraturan dalam Negeri itu disebutkan fungsi kepala Kampung seperti menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlungan masyarakat, administrasi kependudukan, pernyataan dan pengelolaan wilayah.

Fungsi kepala Kampung lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala Kampung juga wajib melaksanakan seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan, fungsi kepala Kampung lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Kepala Kampung juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan Kampung, kepala Kampung memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan Kampung. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala Kampung sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala Kampung juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Soalnya, melalui kepala Kampung -lah beragam keputusan dan laporan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Kampung berpusat.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Kampung pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan kepala Kampung dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kampung bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Kampung mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Kampung mempunyai fungsi yaitu:

- a) Menggerakkan potensi masyarakat.
- b) Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kampung.
- d) Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Kampung mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara

Kepala Kampung beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Sebagai prinsip pembangunan Kampung adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Selain itu pembangunan Kampung tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Kampung menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

Dalam hal fungsi Kepala Kampung sebagai Mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang Kepala Kampung agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai.

Fungsi Kepala Kampung sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya:

- 1) Kepala Kampung harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
- 2) Kepala Kampung harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dengan adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Kampung khususnya Kepala Kampung, maka seorang Kepala Kampung harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Kampung harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status

sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

### **3. Tugas Kepala Kampung**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kampung atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan Kampung pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh Kampung diakui. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Kampung tetap, yaitu;

- 1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Kampung dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan asal usul masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Partisipasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Kampung .

- 3) Otonomi asli, bermakna bahwa kewenangan pemerintahan kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- 4) Demokratisasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Kampung .
- 5) Pemberdayaan masyarakat, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan ,program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 38 Tahun 2002, menjelaskan bahwa kepala Kampung mempunyai fungsi antara lain

- 1) Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Kampung .
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Kampung .
- 3) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kampung
- 4) Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Kampung .
- 5) Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Kampung dan BMK (Badan Musyawarah Kampung)

Menetapkannya Sebagai Peraturan Kampung dengan Persetujuan BPD. **Talizuduhu Ndraha (2005: 5)** mengatakan bahwa fungsi kepala Kampung sebagai pelaksana pembangunan adalah:

- 1) Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Kampung. Perencanaan yang baik adalah apabila

kepala Kampung dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala Kampung hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kampung.

- 2) Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan. Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala Kampung sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat Kampung untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan perkampungan.
- 3) Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Kampung . Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala Kampung harus menanggapi keinginan masyarakat Kampung sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat.
- 4) Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan Kampung . Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi);

sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

- a) Membagi tugas kerja.
  - b) Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.
- 5) Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kampung . Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pekampung an agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaransasaran dan tujun, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan.
- 6) Pengawasan yang baik adalah apabila kepala Kampung memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sejalan dengan pendapat Ndraha diatas, sebagai pelaksana pembangunan fungsi kepala Kampung disamping selaku aparatur pemerintahan kepala Kampung sangat berperanan penting dalam pembangunan Kampung Pembangunan akan berhasil apabila kepala Kampung menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut **Sondang P. Siagian (2005 : 159)** dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala Kampung harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pembangunan pekampung an tidak terlepas dari perencanaan, penggerak dan motivator, pengambilan keputusan, memberikan komunikasi yang jelas, dan pengawasan, serta penilaian dari kepala Kampung .

**Sondang P. Siagian (2003 : 88)** perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut **Robbins dan Coulter dalam Ernie Tisnawati Sule (2004 : 96)** mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan demi tujuan organisasi.

Menurut **Manulang (2004: 45)** untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang mesti dilalui, yaitu : Menetapkan tugas dan tujuan, Mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesi, dan menyusun rencana. Sesuai dengan pendapat di atas kepala kampung harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan program pembangunan kampung . Perencanaan yang baik apabila kepala kampung menentukan proses, program, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan program pembangunan kepala kampung selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan. Penggerakan atau motivasi adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. (**Sondang P. Siagian, 2003: 106**). Motivasi yang dilakukan oleh kepala kampung agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk sumbangan uang, benda, tenaga, dan pikirannya serta ide-ide cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum.

**Arnoff dan Novack (dalam AndiYusran, 2007 : 11).** Untuk melaksanakan pembangunan kepala kampung harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan pembangunan. **S.P. Siagian (2003 : 39)** pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data, yang relevan dengan masalah yang dihadapi, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil.

Sesuai dengan pendapat **Ernie Tisnawati Sule (2004 : 116)** keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani, dan didukung oleh fakta-fakta yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kepala kampung juga berperan dalam memberikan komunikasi yang jelas terhadap bawahan dan masyarakat agar mau bekerja sama, berperan serta, dan berpartisipasi dalam pembangunan perkampungan.

Menurut **Stoner dan Gilbert dalam Ernie Tisnawati Sule (2004: 95)** komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang pemimpin kepala kampung menjadi komunikator yang efektif dimana apabila informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh bawahan dan masyarakatnya. Agar proses pembangunan pedesaan berjalan dengan baik kepala kampung harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kendala-kendala yang terjadi dilapangan bias dievaluasi dan ditindak lanjuti. **Sondang P. Siagian (2003 : 112)** berpendapat pengawasan adalah

proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut **Gilbert dalam Ernie Tisnawati Sule (2004 : 317)** pengawasan adalah pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Dari beberapa defenisi diatas, penulis berpendapat bahwa fungsi kepala kampung sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala kampung sebagai perencana, penggerak, pengambil keputusan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala kampung dalam program pembangunan. Semakin baik dan tinggi dalam menjalankan peranan serta fungsinya sebagai kepala kampung , maka semakin baik dan berhasil pula pembangunan kampung yang direncanakan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak berfungsi dengan baik maka perencanaan pembangunan pedesaan akan terkendala. Kepala kampung adalah sebagai pemimpin masyarakat kampung dan menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan didesanya karena dia harus menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan. Pada dasarnya kepemimpinan kepala kampung itu adalah suatu kemampuan kepala kampung dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan dikampung yang dipimpinnya.

#### **4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi kampung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kampung adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kampung pada buku administrasi Kampung .

Jenis-jenis Administrasi Kampung meliputi:

a) Administrasi Umum adalah, Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kampung pada Buku Administrasi Umum. Bentuk administrasi umum terdiri dari ;

- 1) Buku Data Peraturan Kampung
- 2) Buku Data Keputusan Kepala Kampung
- 3) Buku Data Inventaris Kampung
- 4) Buku Data Aparat Pemerintah Kampung
- 5) Buku Data Tanah Milik Kampung /Tanah Kas Kampung
- 6) Buku Data Tanah di Kampung
- 7) Buku Agenda; dan
- 8) Buku Ekspedisi

b) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari:

- 1) Buku Data Induk Penduduk
- 2) Buku Data Mutasi Penduduk
- 3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan: dan
- 4) Buku Data Penduduk Sementara

c) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelola keuangan pada Buku Administrasi Keuangan.

Bentuk Administrasi Keuangan Kampung terdiri dari :

- 1) Buku Anggaran Penerimaan
- 2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin:
- 3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
- 4) Buku Kas Umum;
- 5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;
- 6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
- 7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

- d) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan.

Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Buku Rencana Pembangunan
  - 2) Buku Kegiatan Pembangunan
  - 3) Buku Inventaris Proyek; dan
  - 4) Buku Kader Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
- e) Administrasi Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan Pencatatan Data dan informasi mengenai BPD

Bentuk Adminstrasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) terdiri dari :

- 1) Buku Data Anggaran BPD
- 2) Buku Data Keputusan BPD
- 3) Buku Data Kegiatan BPD
- 4) Buku Agenda BPD dan :
- 5) Buku Ekspedisi BPD

Dalam hal pelaksanaan Admnistrasi Kampung , Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasinya.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a) Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kampung .
- b) Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kampung
- c) Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kampung ,dan
- d) Memberikan bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kampung .

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

- a) Memfasilitasi Administrasi Kampung
- b) Melakukan pengawasan Administrasi Kampung ; dan
- c) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kampung .

## **5. Pembangunan Kampung**

Pembangunan Kampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pekampungan, akan tetapi lebih jauh dari itu, kampung dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam Wilayah pembangunan masyarakat Kampung atau khususnya Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan Daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan, kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat kampung serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

## **6. Pengertian Kampung**

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 tahun 2005 tentang perangkat Kampung di dalam pasal 1 point (g) bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Kampung yaitu :Berikut pengertian tentang Kampung menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintah kampung bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5 kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara republik Indonesia.

Menurut **Soetardjo, (2004:15), dan Yuliati, (2003:24)**, kata “Kampung” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas

Menurut **Bouman Beratha, (1982:26)**, mengemukakan bahwa “Kampung adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Menurut **B. N Marbun (2006:15)**, mengemukakan bahwa: “Kampung ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial

yang tinggi/menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Kampung”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara republik Indonesia. ( UU. No 23 Tahun 2014) Dengan demikian bahwa pemerintah kampung adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

## **7. Konsep Pemerintahan Kampung**

Pemerintah Kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Kampung dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada Kampung melalui pemerintah Kampung dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pendapat Nasroen bahwa Kampung sebagai lembaga sosial (social institution) merupakan refleksi dari ikatan persaudaraan (brotherhood) dan kekeluargaan yang terjadi berdasarkan interaksi social antara individu. Seirama juga dengan alur pikir dari, Darji Darmodiharjo dan Shidarta mengatakan bahwa : konsep Indonesia tentang hubungan antara manusia tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (brotherhood), tetapi meliputi hubungan antara manusia dan manusia dengan masyarakat sehingga kaitannya lebih luas.

Di Provinsi Papua dengan adanya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebutan untuk Kampung berubah menjadi Kampung, namun pada pelaksanaannya sama dengan Kampung di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung . Peraturan daerah kabupaten Jayawijaya Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan menjadi Distrik kabupaten dan Kampung menjadi Kampung, sesuai pasal 3 ayat 20 juga diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, maka sebutan kecamatan menjadi distrik.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

1. Tugas dan fungsi bagian pasal 6

- a) Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- b) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah menguraikan teori, pengertian dan regulasi tentang pelaksanaan fungsi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung herawa maka, akan menghasilkan indikator yang akan di jadikan penilaian Menurut **Talizuduhu Ndraha (2005: 5)** mengatakan bahwa fungsi kepala Kampung sebagai pelaksana pembangunan Kampung yaitu : (1). Penyelenggaraan pemerintahan Kampung, (2). Melaksanakan pembangunan, (3). Pembinaan kemasyarakatan, (4). Pemberdayaan masyarakat (5). Menjaga hubungan kemitraan .

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu oleh pihak lain dapat dipakai dalam pengkajian yang berkaitan dengan fungsi kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Sumber/referensi
1	Deibby K. A Pangkey	Peran kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Keberhasilan pembangunan suatu Kampung tidak terlepas dari peran Kepala Kampung sebagai pemimpin yang ada di Kampung, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah Kampung	Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat)

			<p>itu sendiri yaitu fungsi pembangunan.</p> <p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala Kampung dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh Kampung melalui dana kampung, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.</p>	
2	Sriulina	Tugas Dan Fungsi Kepala Kampung Berserta Perangkat Kampung Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Kampung Namo Bintang	Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan Kampung memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang. Substansi pokok yang tidak berubah ialah bahwa pemerintahan	Jurnal ilmu pemerintahan ISSN : 2085 – 0328

		Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.	Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat Kampung Hasil penelitian menunjukkan bawah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kepada Kampung dan perangkat Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi pelaksanaan daripada tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap perangkat Kampung perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat.
--	--	---	--

### C. Definisi Operasional

Fungsi kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan pemerintahan tingkat paling bawah, dengan adanya pemerintahan kampung sehingga fungsi dari pada roda pemerintahan dapat di jalankan, untuk mencapai fungsi kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung agar masyarakat dapat di rasakan melalui yaitu : (a). Penyelenggaraan pemerintahan kampung, (b). Melaksanakan pembangunan, (c). Pembinaan kemasyarakatan, (d). Pemberdayaan masyarakat (e). Menjaga hubungan kemitraan .

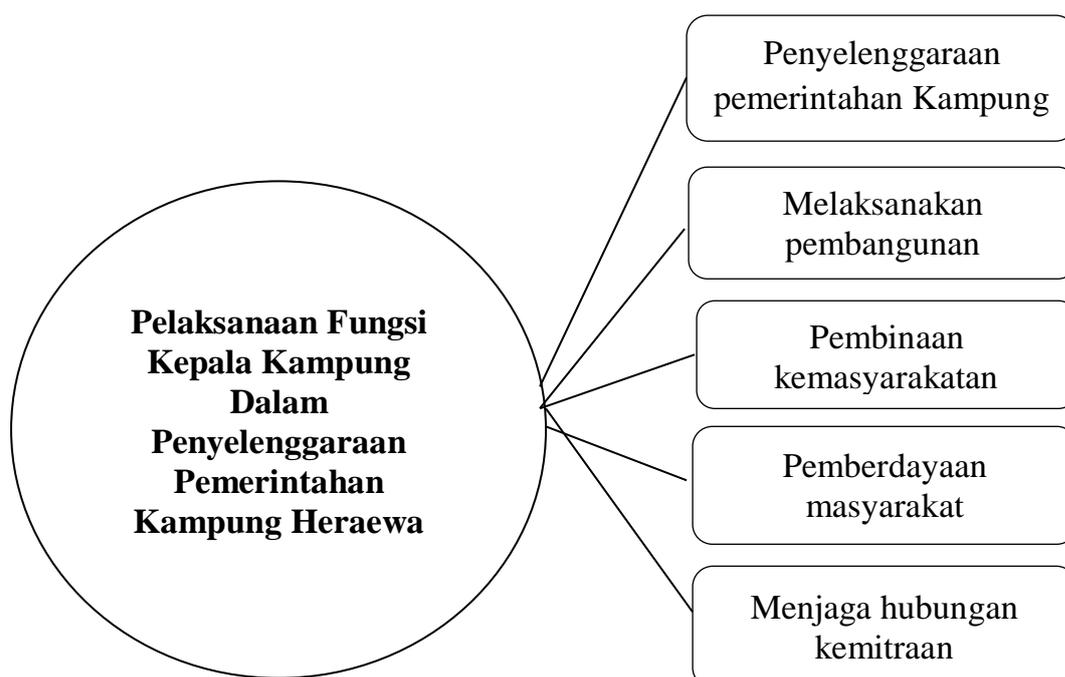
Berdasarkan definisi operasional dari variabel fungsi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung maka, penulis

mendefinisikan faktor-faktor fungsi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **D. Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan polah pikir variabel yang di teliti, di buat kerangka konseptual sebagai berikut :



Dalam kerangka konseptual penelitian diatas terlihat bahwa pada penelitian ini hanya terdapat satu kerangka konseptual kepala Kampung dengan indikator : (1). penyelenggaraan pemerintahan Kampung (2). melaksanakan pembangunan, (3). Pembinaan kemasyarakatan, (4). pemberdayaan masyarakat dan (5). menjaga hubungan kemitraan.

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian di Kampung Heraewa

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini kurang lebih selama  $\pm 1$  (Satu) bulan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif yang berusaha mendiskripsikan dan merumuskan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. Menurut sugiyono (2009: 90), penelitian deskriptif kuantitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian dan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini di dasarkan atas pemikiran dan alasan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada lokasi penelitian di Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini, merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh penulis. Seperti menurut sugiyono (2011: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi yang akan

digunakan sebagai penelitian adalah 13 orang yang ada di Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya.

## **2. Sampel**

Menurut sugiyono (2008:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel hendaknya memperhentikan sebagai aspek karena kesimpulan dari hasil penelitian yang dipelajari melalui dari sampel yang diambil harus representatif, sehingga betul-betul mewakili keseluruhan populasi.

Teknik sampel atau cara penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh yakni apabila jumlah populasi kurang dari 30 orang maka diambil semua sebagai sampel. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 13 orang.

## **D. Instrumen Penelitian**

Menurut sugiyono (2009: 118), mengemukakan instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diamati. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), kuesioner menggunakan skala likhert dengan alternative jawab yakni :

1. Sangat baik        SB diberikan nilai skor 4
2. Cukup baik        CB diberikan nilai skor 3
3. Kurang baik        KB diberikan nilai skor 2
4. Tidak baik        TB diberikan nilai skor 1

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penilaian, mendapatkan data dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

## 1). **Kajian kepustakaan**

Kepustakaan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui perputakaan, baik itu berupa buku-buku literatur, diktat – diktat, bahan dari materi perkuliahan, peraturan – peraturan, undang – undang dan sebagiannya yang memuat keterangan tentang masalah yang diperlukan dalam pembahasan ini.

## 2). **Pengamatan (*Observasi*)**

Suetrisno hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Boleh dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan gejala – gejala yang nampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung di tempat peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi

### **a. Kuesioner**

Menurut sugiyono, (2008 : 162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan. Dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah teknik utama dalam pengumpulan data penelitian untuk mengungkapkan data tentang upaya – upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli di kampung

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Melalui analisis ini hasil penelitian diuraikan untuk memperoleh gambaran dan angka – angka yang jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. Menurut hasan (2006 : 34), teknik analisa data suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau data ringkasan dengan menggunakan cara – cara atau rumus – rumus tertentu. Pengelolaan data bertujuan untuk mengubah data menta dari hasil pengukuran menjadi data yang menjadi lebih halus, sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Jarak skor ideal (skor maksimum) = 4 X jumlah responden

$$= 4 \times 13$$

$$= 52$$

Jumlah skor terendah (skor minimum) = 1 X jumlah responden

$$= 1 \times 13$$

$$= 13$$

Berdasarkan nilai skor terendah (skor minimum) 13 dan skor ideal (skor maksimum) 52 maka diinterpretasikan ke dalam tabel di bawa ini :

**Tabel : 02**

**Tabel interpretasi penelitian**

No	Nilai Skor	Predikat
1	$39 < \text{Jumlah skor} \leq 52$	Sangat baik
2	$26 < \text{Jumlah skor} \leq 39$	Cukup baik
3	$13 < \text{Jumlah skor} \leq 26$	Kurang baik
4	$1 < \text{Jumlah skor} \leq 13$	Tidak baik

*Sumber : Tabel menurut hasan 2006*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Lokasi Penelitian**

###### **a. Keadaan Kampung Heraewa**

Kampung Heraewa merupakan salah satu Kampung yang dimiliki oleh Distrik Maima dimana Kampung yang lain yaitu Kampung Minimo, Kampung Husewa, Kampung Menagaima, Kampung Maima, Kampung Kepi, Kampung Hesiak dan Kampung Heraewa . Batas Kampung Heraewa :

Sebelah timur perbatasan dengan Kampung Minimo

Sebelah barat perbatasan dengan Kampung Husewa

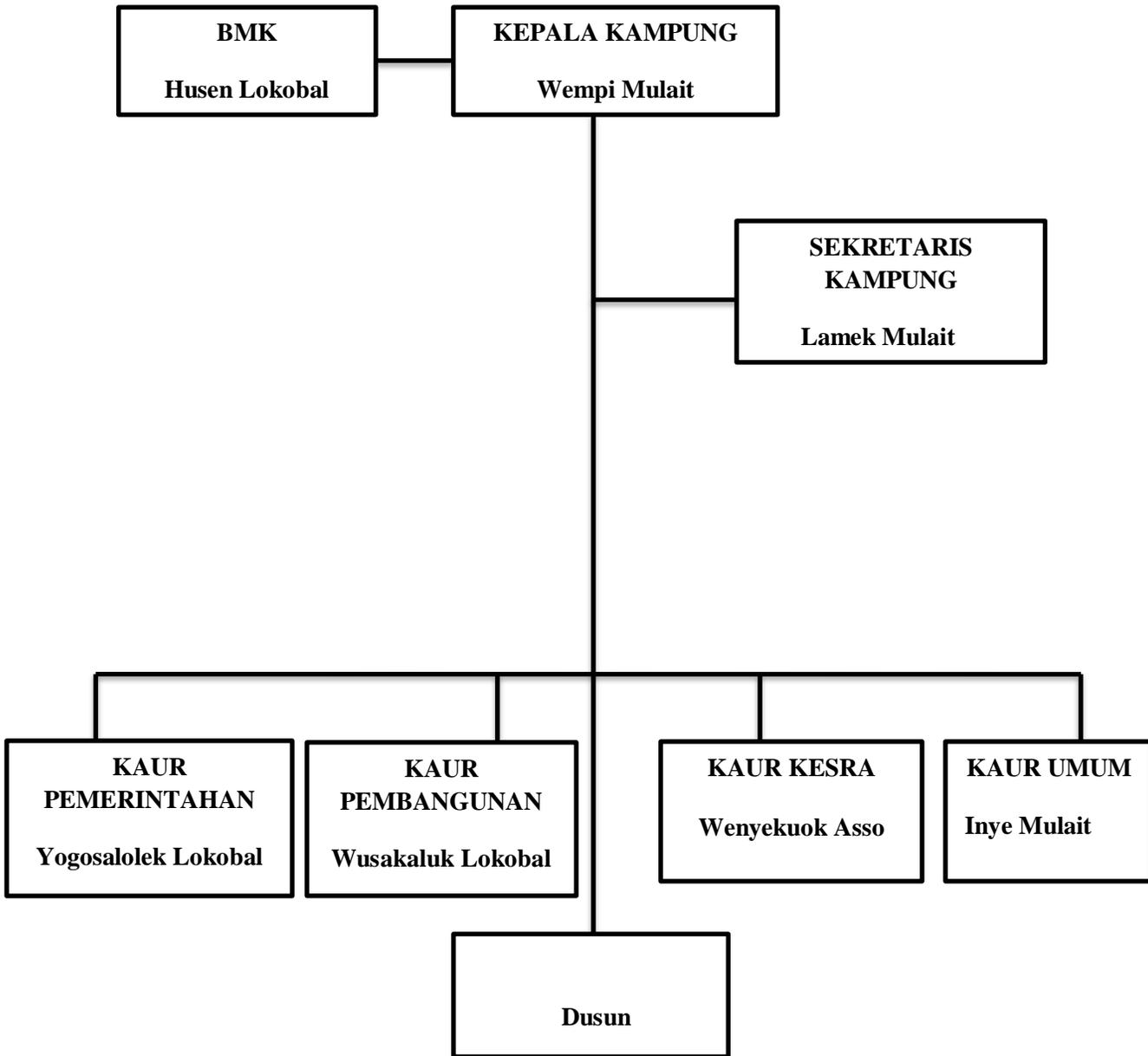
Sebelah selatan perbatasan dengan Kampung Menagaima

Sebelah utara perbatasan dengan Kampung Hesiak

###### **b. Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Heraewa**

Berdasarkan susunan organisasi pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya, maka dapat digambarkan struktur organisasi sebagai berikut :

**Gambar : 03**  
**Susunan Organisasi Kampung Heraewa**



*Sumber data: Kantor kampung Heraewa , Tahun 2020*

Susunan organisasi pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya No 4 Tahun 2004, susunan Organisasi pemerintah Kampung terdiri dari

## **1. Kepala Kampung**

Tugas dan Fungsi kepala kampung adalah:

- a. Memimpin Penyelenggara pemerintah kampung
- b. Membina kehidupan masyarakat kampung
- c. Membina perekonomian kampung
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- f. Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugas kepala kampung dibantu oleh sekretaris kampung.

## **2. Sekretaris Kampung**

Tugas dan fungsi sekretaris kampung

a. sekretaris kampung mempunyai tugas antara lain :

1. menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung.
2. memberikan pelayanan administrasi kepada kepala kampung

b. Fungsi Sekretaris kampung adalah :

1. melaksanakan urusan surat-menyurat
2. kearsiapan dan laporan
3. melaksanakan urusan administrasi pemerintahan
4. melaksanakan tugas dan fungsi dari kepala kampung apabila kepala kampung berhalangan melakukan tugasnya.

## **3. Kepala Urusan Pemerintahan**

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan yaitu :

- a. mengisi buku keputusan pemerintahan kampung
- b. mengisi buku kekayaan dan inventaris kampung buku data tanah di kampung.
- c. mengisi buku administrasi penduduk buku data penduduk yang terdiri dari : data induk penduduk dan data rekapitulasi akhir bulan.
- d. melaksanakan urusan pemerintah lainnya.

#### **4. Kepala Urusan Umum**

Kedudukan kepala urusan umum adalah sebagai unsur pembantu sekretaris kampung dalam bidang tugasnya, Fungsi Kepala Urusan adalah kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan pelayanan administrasi terhadap kepala kampung.

Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu sekretaris dan kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris kampung.

Sedangkan Fungsi Kepala Urusan yaitu :

- a) mengisi buku kekayaan dan inventaris kampung
- b) mengisi buku agenda surat masuk dan surat keluar
- c) mengisi buku administrasi keuangan kampung
- d) melaksanakan surat menyurat dan kearsipan

#### **5. Kepala Urusan Pembangunan**

Tugas kepala Urusan Pembangunan adalah :

1. melaksanakan administrasi pembangunan
2. mencatat dan mempersiapkan bahan guna pembuatan usulan rencana proyek
3. mengadakan pelayanan dan pencatatan dalam hal pembuatan permohonan izin usaha bangunan dan lain-lain.

## **6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat**

- a. Tugas urusan kesejahteraan Rakyat adalah :
- b. Melaksanakan pencatatan surat dan keadaan kesejahteraan rakyat
- c. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan Masyarakat dan PKK, mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan PKK
- d. Menerbitkan surat menyurat keterangan lainnya misalnya seperti :
  1. Kematian
  2. Surat keterangan minta sumbangan untuk kerja bakti

### **c. Tata Kerja Pemerintahan Kampung**

Kepala kampung selaku kepala pemerintahan kampung mempunyai kewenangan untuk membimbing, membina serta mengadakan koordinasi dengan Badan Musyawara kampung, dengan staf yang berada dibawah kepala kampung dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan membina kehidupan masyarakat dalam pembangunan kampung untuk menyelenggarakan tugas administrasi umum di kampung, dilaksanakan oleh sekretaris kampung dan kepala kampung membawahi 4 kepala kampung urusan yaitu : kepala Urusan Pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan kepala urusan kesejahteraan masyarakat.

#### **1. Keadaan Responden**

##### **a. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.**

Keadaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel : 4. 1**

**Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	7	53,83
2	Perempuan	6	46,1
Jumlah		13	100

*Sumber data: Primer tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4. 2. diatas menunjukkan bahwa keadaan Responden berdasarkan jenis kelamin yaitu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 53,83% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang atau sebanyak 46,1%.

**b. Keadaan responden berdasarkan tingkat agama.**

Untuk mengetahui tingkat agama responden maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 2**

**Keadaan responden berdasarkan tingkat agama**

No	Tingkat agama	Jumlah	Presentase
1.	Hindu	-	-
2	Budha	-	-
3	Kristen katholik	5	38,4
	Kristen protestan	5	38,4
	Islam	3	23,0
Jumlah		13	100

*Sumber data: Primer tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4. 3. diatas menunjukkan bahwa responden yang agama hindu sebanyak 0 orang atau 0%, yang agama budha sebanyak 0 orang atau 0%

yang agama Kristen katolik sebanyak 5 orang atau 38,4%, yang agama Kristen protestan sebanyak 5 orang atau 38,4% dan yang agama islam sebanyak 3 orang atau 23,0%.

**c. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

Untuk mengetahui tingkat pendidikan Responden maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 3**

**Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	8	61,5
2	SLTP	3	23,0
3	SLTA	2	15,3
Jumlah		13	100

*Sumber data: Primer tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4. 4. diatas menunjukkan bahwa responden yang sekolah dasar ( SD ) sebanyak 8 orang atau 61,5%, yang lulusan SLTP adalah 3 orang atau 23,0 % sedangkan yang lulusan SLTA adalah 2 orang atau 15,3%.

**d. Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Untuk mengetahui keadaan pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 4**

**Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Kepala kampung	1	7,6
2	Sekretaris	1	7,69
3	Aparat	11	84,61
Jumlah		13	100

*Sumber data: Primer tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4. 4. diatas menunjukkan bahwa responden yang jabatan kepala kampung sebanyak 1 orang atau 7,6% , yang jabatan sekretaris sebanyak 1 orang atau 7,69% dan yang jabatan aparat sebanyak 11 orang atau 84,61%.

## **2. Analisa Data**

Analisa data tentang Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya . adapun lima indikator yaitu :

### **a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung**

Adapun yang menjadi indikator dapat di lihat pada tabel dibawa ini.

1. Tanggapan Responden tentang penyelenggaraan pemerintah kampung Kabupaten Jayawijaya dengan Indikator melaksanakan pembangunan daerah dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 5**

**Tanggapan Responden Tentang . penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam perlindungan masyarakat**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat baik	4	7	28
Cukup Baik	3	2	6
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	2	2
Jumlah		13	40

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam perlindungan masyarakat sebanyak 7 orang dengan jumlah Skor sebesar 28 , yang mengatakan cukup baik sebanyak 2 orang atau jumlah skor sebesar 6, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah nilai skor 4 dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang atau dengan jumlah skor 2. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam perlindungan masyarakat dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 40.

2. Tanggapan responden pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel: 4. 6**

**Tanggapan Responden tentang pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat baik	4	8	32
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	44

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung, sebanyak 8 orang atau jumlah skor sebesar 32, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang atau jumlah skor sebanyak 9, yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau jumlah skor sebesar 2, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang atau jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung, di kategorikan sangat baik yaitu dengan skor 44.

**3.** Tanggapan Responden tentang penyelenggaraan penataan dan pembangunan wilayah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 4. 7**

**Tanggapan Responden penyelenggaraan penataan dan pembangunan wilayah**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat Baik	4	8	32
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	1	2
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		13	44

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung, sebanyak 8 orang dengan jumlah skor 32, yang mengatakan cukup baik, sebanyak 3, orang dengan jumlah skor sebesar 9, yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 2, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung, di kategorikan sangat baik yaitu dengan skor 44.

**b. Melaksanakan pembangunan**

Indikator melaksanakan pembangunan pada tabel –tabel berikut ini.

1. Tanggapan responden tentang melaksanakan pembangunan sarana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 4. 8**

**Tanggapan Responden Tentang melaksanakan pembangunan sarana .**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	7	28
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
		13	42

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik melaksanakan pembangunan sarana sebanyak 7 orang dengan jumlah skor 28, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 9, yang mengatakan baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa ksanakan pembangunan sarana dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 42.

**2.** Tanggapan responden tentang Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabal : 4. 9**

**Tanggapan Responden Tentang Pembangunan bidang pendidikan**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat baik	4	8	32
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	44

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pembangunan bidang pendidikan, sebanyak 8 orang dengan jumlah skor 32, yang mengatakan cukup baik sebanyak 6 orang dengan jumlah skor sebesar 9 , yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 2, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan bidang pendidikan dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 44.

3. Tanggapan responden tentang pemerintah salurkan beras sejahtera ke kampung sesuai jumlah dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel : 4. 10**

**Tanggapan Responden Tentang Pembangunan bidang kesehatan**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	7	28
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	42

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik, Pembangunan bidang kesehatan sebanyak 7 orang dengan jumlah skor 28, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 9, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan bidang kesehatan dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 44.

**c. Pembinaan kemasyarakatan**

Berikut ini penjelasan indikator pembinaan kemasyarakatan melalui beberapa sub indikator pada tabel berikut ini.

1. Tanggapan Responden tentang Pembinaan partisipasi masyarakat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : 4. 11**

**Tanggapan Responden Tentang Pembinaan partisipasi masyarakat**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	6	24
Cukup baik	3	4	12
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	41

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pembinaan partisipasi masyarakat sebanyak 6 orang dengan jumlah skor 24, yang mengatakan cukup baik sebanyak 4 orang dengan jumlah skor sebesar 12 , yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan partisipasi masyarakat dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 41.

2. Tanggapan responden tentan Pembinaan sosial budaya masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 12**

**Tanggapan Responden Tentang Pembinaan sosial budaya masyarakat**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	6	24
Cukup baik	3	4	12
Kurang baik	2	1	2
Tidak baik	1	2	2
Jumlah		13	40

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pembinaan sosial budaya masyarakat sebanyak 6 orang dengan jumlah skor 24, yang

mengatakan cukup baik sebanyak 4 orang dengan jumlah skor sebesar 12, yang mengatakan kurang baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 2, yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan sosial budaya masyarakat dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 40.

3. Tanggapan responden tentang Pembinaan keagamaan dan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 13**

**Tanggapan Responden Tentang responden tentang Pembinaan keagamaan dan ketenaga kerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	5	20
Cukup baik	3	5	15
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik, Pembinaan keagamaan dan ketenaga kerjaan sebanyak 5 orang dengan jumlah skor 20, yang mengatakan cukup baik sebanyak 5 orang dengan jumlah skor sebesar 15 , yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan keagamaan dan ketenagakerjaan dikategorikan sangat baik dengan skor 40.

#### **d. Pemberdayaan masyarakat**

Berikut ini penjelasan indikator Pemberdayaan masyarakat melalui beberapa sub indikator pada tabel berikut ini.

1. Tanggapan Responden tentang pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : 4. 14**

**Tanggapan Responden Tentang pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Presentase</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	5	20
Cukup baik	3	4	12
Kurang baik	2	3	6
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	39

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat sebanyak 5 orang dengan jumlah skor 20, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 12, yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 6, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 39.

2. tanggapan responden tentang pemberdayaan di bidang budaya dan ekonomi dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 15**

**Tanggapan Responden Tentang pemberdayaan di bidang budaya dan ekonomi**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	5	20
Cukup baik	3	4	12
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	2	2
Jumlah		13	40

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik pemberdayaan di bidang budaya dan ekonomi sebanyak 5 orang dengan jumlah skor 20, yang mengatakan cukup baik sebanyak 4 orang dengan jumlah skor sebesar 12, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 2, Hal ini menunjukkan bahwa beras sejahtera sesuai tepat waktu dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 40.

3. Tanggapan responden tentang Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 16**

**Tanggapan Responden Tentang Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	6	24
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	3	6
Tidak baik	1	1	1
Jumlah		13	40

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna sebanyak 6 orang dengan jumlah skor 24, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 9, yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 6, yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan jumlah skor sebesar 1, Hal ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna dikategorikan sangat baik yaitu dengan skor 40.

**e. Menjaga hubungan kemitraan**

Berikut ini penjelasan indikator menjaga hubungan kemitraan beberapa sub indikator pada tabel berikut ini.

1. Tanggapan Responden tentang Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : 4. 17**

**Tanggapan Responden Tentang Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Presentase</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	1	4
Cukup baik	3	2	6
Kurang baik	2	5	10
Tidak baik	1	5	5
Jumlah		13	25

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat sebanyak 1 orang dengan jumlah skor 4, yang mengatakan cukup baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 6, yang mengatakan kurang baik sebanyak 5 orang dengan jumlah skor sebesar 10, yang mengatakan tidak baik sebanyak 5 orang dengan jumlah skor

sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dikategorikan kurang baik yaitu dengan skor 25.

2. Tanggapan responden tentang Hubungan kemitraan dengan lembaga lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 18**

**Tanggapan Responden Tentang Hubungan kemitraan dengan lembaga lain**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	4	16
Cukup baik	3	3	9
Kurang baik	2	3	6
Tidak baik	1	3	3
Jumlah		13	34

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik Hubungan kemitraan dengan lembaga lain sebanyak 4 orang dengan jumlah skor 16, yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 9, yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 6, yang mengatakan tidak baik sebanyak 3 orang dengan jumlah skor sebesar 3, Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kemitraan dengan lembaga lain dikategorikan cukup baik yaitu dengan skor 34.

3. Tanggapan responden tentang membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel : 4. 19**

**Tanggapan Responden Tentang membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain**

<b>Kategori</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah skor</b>
Sangat baik	4	5	20
Cukup baik	3	4	12
Kurang baik	2	2	4
Tidak baik	1	2	2
Jumlah		13	38

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengatakan sangat baik membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain sebanyak 5 orang dengan jumlah skor 20, yang mengatakan cukup baik sebanyak 4 orang dengan jumlah skor sebesar 12, yang mengatakan kurang baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 4, yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan jumlah skor sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain dikategorikan cukup baik yaitu dengan skor 38.

**B. Pembahasan**

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil analisa data maka dapat di dibahas sebagai berikut :

**a. Indikator Tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung**

Indikator tentang Penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel : 4. 20**

**Rata-Rata Indikator Tentang Penyelenggaraan pemerintahan kampung**

No	Sub-sub indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Menyelenggarakan pemerintahan kampung dalam perlindungan masyarakat	2	4	6	28	40
2	Pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah kampung	1	2	9	32	44
3	Menyelenggarakan penataan dan pembangunan wilayah	1	2	9	32	44
	<b>Rata-rata</b>					42,6

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 42,6 sangat baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan dan menata wilaya menunjukkan sangat baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam penyelenggaraan dan menata wilayah sangat baik

**b. Indikator Tentang melaksanakan pembangunan**

Indikator tentang melaksanakan pembangunan yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel: 4. 21**

**Rata-Rata Indikator Tentang melaksanakan pembangunan**

No	Sub-sub indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Melaksanakan pembangunan sarana	1	4	9	28	42
2	Pembangunan bidang pendidikan	1	2	9	32	44
3	Pembangunan bidang kesehatan	1	4	9	28	42
	<b>Rata-rata</b>					42,6

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator melaksanakan pembangunan adalah 42, 6 sangat baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan melaksanakan pembangunan dalam pembangunan Kampung dapat berjalan dengan baik sesuai program kerja Kampung maka menunjukkan sangat baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai melaksanakan pembangunan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sesuai rap tersebut maka menunjukkan sangat baik.

**c. Indikator Tentang Pembinaan kemasyarakatan**

Indikator tentang tepat jumlah yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel : 4 : 22**

**Rata-Rata Indikator Tentang Pembinaan kemasyarakatan**

No	Sub-sub indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Pembinaan partisipasi masyarakat	1	4	12	24	41
2	Pembinaan sosial budaya masyarakat	1	2	12	24	40
3	Pembinaan keagamaan dan ketenagakerjaan	1	4	15	20	40
	<b>Rata-rata</b>					40,33

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pembinaan kemasyarakatan adalah 40,33 sangat baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pembinaan kemasyarakatan melalui program kampung menunjukkan sangat baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pembinaan kemasyarakatan melalui program Kampung dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat Kampung sehingga menunjukkan sangat baik.

**d. Indikator Tentang pemberdayaan masyarakat**

Indikator tentang pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel : 4 . 23**

**Rata-Rata Indikator Tentang pemberdayaan masyarakat**

No	Sub-sub indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat	1	6	12	20	39
2	Pemberdayaan di bidang budaya dan ekonomi	1	4	12	20	40
3	Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna	1	6	9	24	40
	<b>Rata-rata</b>					39,6

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator pemberdayaan masyarakat adalah 39,6 sangat baik.

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan dapat di arahkan sosialisasi dan motivasi untuk di berdayakan melalui program kampung menunjukan sangat baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi sehingga memotivasi untuk membangun program kampung menunjukan sangat baik.

**e. Indikator Tentang menjaga hubungan kemitraan**

Indikator tentang tepat kualitas yang terdiri dari beberapa sub indikator yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 4 : 24**

**Rata-Rata Indikator Tentang menjaga hubungan kemitraan**

No	Sub-sub indikator	Skor				Rata-rata Skor
		4	3	2	1	
1	Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat	4	6	10	5	25
2	Hubungan kemitraan dengan lembaga lain	6	9	6	3	34
3	Membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain	20	12	4	2	38
	<b>Rata-rata</b>					32,33

*Sumber data: Kuesioner diolah tahun, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator menjaga hubungan kemitraan adalah 32,33 tidak baik. Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan menjaga hubungan kemitraan yang kurang baik dalam pembangunan program masyarakat Kampung menunjukkan cukup baik.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai menjaga hubungan kemitraan yang kurang baik dalam membangun program masyarakat Kampung dengan lembaga lain menunjukkan cukup baik.

**Tabel : 4. 25**

**Rekapitulasi rata-rata pada variabel pelaksanaan fungsi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung heraewa**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
1.	Penyelenggaraan pemerintahan Kampung	42,6	Sangat baik
2.	Melaksanakan pembangunan	42,6	Sangat baik
3.	Pembinaan kemasyarakatan	40,33	Sangat baik
4.	Pemberdayaan masyarakat	39,6	Tidak baik
5.	Menjaga hubungan kemitraan	32,33	Cukup baik
	Rata-rata	39,5	Cukup baik

*Sumber data :primer tahun 2020.*

Berdasarkan tabel 4. 25 di atas, indikator penyelenggaraan pemerintahan Kampung adalah 42,6 sangat baik, melaksanakan pembangunan adalah 42,6 sangat baik, pembinaan kemasyarakatan adalah 40,33 sangat baik, pemberdayaan masyarakat adalah 39,6 tidak baik dan menjaga hubungan kemitraan adalah 32,33 cukup baik. Dengan skor rata-rata 39,5 cukup baik.

Seluruh skor hasil penghitungan untuk semua indikator berada pada predikat cukup baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4. 25 di atas menunjukkan skor tertinggi berasal dari indikator penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan skor 39,5 yang berada pada predikat sangat baik, yang menunjukkan Fungsi Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sangat baik. Fungsi Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Heraewa dalam menjalankan program pembangunan Kampung

oleh pemerintah Kampung diberdayakan masyarakat Kampung selama ini dapat berjalan dengan sangat baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Sriulina dengan judul penelitian tugas dan Fungsi Kepala Kampung beserta perangkat Kampung dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Kampung Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kampung merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan Kampung memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang. Substansi pokok yang tidak berubah ialah bahwa pemerintahan Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat Kampung

Hasil penelitian menunjukkan bawah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kepala Kampung dan perangkat Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi pelaksanaan daripada tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap perangkat Kampung perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan , maka dapat ditarik kesimpulan

Rata-rata variabel Fungsi Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya. dengan indikator yaitu : a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung adalah 42,6 sangat baik . b. melaksanakan pembangunan adalah 42,6 sangat baik . c. pembinaan kemasyarakatan adalah 40,33 cukup baik d. pemberdayaan masyarakat adalah 39,6 tidak baik. e. menjaga hubungan kemitraan adalah 32,33 tidak baik .

Jadi Fungsi Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Heraewa Distrik Maima dengan skor 39,5 predikat cukup baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Perlu di tingkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat Kampung.
2. Perlu di tingkatkan pelaksanaan program pembangunan Kampung
3. Perlu di tingkatkan pembinaan masyarakat untuk di berdayakan melalui program masyarakat Kampung.
4. Perlu di tingkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui dana kampung
5. Perlu adanya hubungan kemitraan dengan lembaga lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Nn Prisma, Jakarta
- Agus, Dwiyanto. 1995. *Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta University Press, Yogyakarta
- Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bayu Suryaningrat. 1976. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta
- Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT. Alumni
- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Maryadi dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta : FKIP UMS
- Saparin. Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula)*. Yogyakarta:UGM Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Surianingrat Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.

idjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **B . Dokumen**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa

Peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 tahun 2005 tentang prangkat Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

UUD Nomor 20 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Provinsi Papua

UUD Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

## KUISIONER PENELITIAN

### 1. Petunjuk Pengisian

- a. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- b. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- c. Jawablah semua dalam daftar pernyataan di bawah ini

### II. Identitas Responden

No. responden : .....

Tingkat pendidikan : .....

Agama : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan : .....

### III. Matriks Pernyataan

No.	Pernyataan	Predikat			
		SB	CB	KB	TB
Penyelenggaraan pemerintahan kampung					
1	Menyelenggarakan pemerintahan kampung dalam perlindungan masyarakat				
2	Pembinaan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah kampung				
3	Menyelenggarakan penataan dan pembangunan wilayah				
Melaksanakan pembangunan					
1	Melaksanakan pembangunan sarana				
2	Pembangunan bidang pendidikan				
3	Pembangunan bidang kesehatan				
Pembinaan kemasyarakatan					
1	Pembinaan partisipasi masyarakat				
2	Pembinaan sosial budaya masyarakat				
3	Pembinaan keagamaan dan ketenagakerjaan				
Pemberdayaan masyarakat					
1	Pemberdayaan sosialisasi dan motivasi masyarakat				
2	Pemberdayaan di bidang budaya dan ekonomi				
3	Pemberdayaan bidang pemuda, olahraga dan karang taruna				
Menjaga hubungan kemitraan					
1	Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat				
2	Hubungan kemitraan dengan lembaga lain				
3	Membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat lain.				

**Lampiran 2: Data Hasil Penelitian**

**1. Penyelenggaraan pemerintahan kampung**

Pertanyaan 1

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			
6	√			
7			√	
8	√			
9				√
10				√
11	√			
12			√	
13	√			
Jumlah	7	2	2	2

Pertanyaan 2

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	√			
2	√			
3		√		
4	√			
5				√
6	√			
7	√			
8	√			
9			√	
10		√		

11	√			
12	√			
13		√		
Jumlah	8	3	1	1

Pertanyaan 3

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			
6	√			
7			√	
8	√			
9	√			
10				√
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	8	3	1	1

**2. Melaksanakan pembangunan**

Pertanyaan 1

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			
6	√			
7			√	
8	√			

9			√	
10				√
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	7	3	2	1

Pertanyaan 2

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			
6	√			
7			√	
8	√			
9	√			
10				√
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	8	3	1	1

Pertanyaan 3

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5	√			
6	√			
7			√	
8	√			

9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13				√
Jumlah	7	3	2	1

### 3. Pembinaan masyarakat

#### Pertanyaan 1

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5		√		
6	√			
7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	6	4	2	1

#### Pertanyaan 2

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5		√		
6	√			
7			√	

8				√
9	√			
10				√
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	6	4	1	2

Pertanyaan 3

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5		√		
6	√			
7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13		√		
Jumlah	5	5	2	1

**4. Pemberdayaan masyarakat**

Pertanyaan 1

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5		√		
6	√			

7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13			√	
Jumlah	5	4	3	1

Pertanyaan 2

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3		√		
4	√			
5		√		
6	√			
7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13				√
Jumlah	5	4	2	2

Pertanyaan 3

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3			√	
4	√			
5		√		
6	√			
7			√	

8				√
9	√			
10			√	
11	√			
12		√		
13	√			
Jumlah	6	3	3	1

## 5. Menjaga hubungan kemitraan

### Pertanyaan 1

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1			√	
2	√			
3			√	
4				√
5		√		
6				√
7			√	
8				√
9			√	
10			√	
11				√
12		√		
13				√
Jumlah	1	2	5	5

### Pertanyaan 2

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
---------------	-------------	------------	-------------	------------

1			√	
2	√			
3	√			
4				√
5		√		
6				√
7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11		√		
12		√		
13	√			
Jumlah	4	3	3	3

Pertanyaan 3

No. Responden	Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1		√		
2	√			
3	√			
4	√			
5		√		
6				√
7			√	
8				√
9	√			
10			√	
11		√		
12		√		
13	√			
Jumlah	5	4	2	2

Foto : Saat pengisian Kuesioner, 2020



**Foto : Bersama kepala kampung herawa, 2020.**



## BIODATA PENULIS



AMINATUS SA'ADIYAH, penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara lahir pada tanggal 10 Oktober 1996 di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Muhammad Ali Asso dan Ibu Syarina, adapun identitas penulis yaitu :

1. SD Pondok Pesantren Syalafiah Syafiah Sukerjo Situbondo Jawa Timur pada tahun 2019.
2. SMP PKBM Anewu Distrik Assolokobal pada tahun 2015.
3. SMA PKBM Anewu Distrik Assolokobal pada tahun 2016.
4. Perguruan Tinggi di Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena.